

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

Eka Genta Asyuni^{*1}, Mashur Razak², Syamsul Alam³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}ekagentaasyuni83@gmail.com, ²mashur_razak@yahoo.co.id, ³syamsulalam@stienobel-indonesia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal secara parsial terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. (2) Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. (3) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 30 orang Pegawai. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan studi dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara parsial implementasi standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Sedangkan, budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. (2) Secara simultan Standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas sistem informasi akuntansi. (3) Sistem pengendalian internal merupakan variabel yang paling dominan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi.

ABSTRACT

This study aims to analyze (1) The influence of implementing government accounting standards, organizational culture, and internal control systems partially on the quality of accounting information systems. (2) The influence of the implementation of government accounting standards, organizational culture, and internal control systems simultaneously influence the quality of accounting information systems. (3) The most dominant variable influencing the quality of the accounting information system at the National Unity and Politics Agency of West Sulawesi Province.

This study uses a quantitative method with a sample of 30 employees. Data collection methods used are questionnaires and document studies. The analytical method used is descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis.

The results of the research show that (1) Partially, the implementation of government accounting standards and internal control systems has a significant effect on the quality of accounting information systems. Meanwhile, organizational culture has no significant effect on the quality of accounting information systems. (2) Simultaneously, government accounting standards, organizational culture, and internal control systems have a positive and significant effect on the quality of accounting information systems. (3) The internal control system is the most dominant variable in the quality of the accounting information system at the National Unity and Politics Agency of West Sulawesi Province.

Keywords: *Government Accounting Standards, Organizational Culture, Internal Control Systems, and Quality of Accounting Information Systems.*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini organisasi sangat tergantung pada sistem informasi agar dapat beroperasi secara efektif, efisien dan terkendali. Efektivitas, efisiensi dan pengendalian dapat terwujud melalui penggunaan informasi yang berkualitas yang dihasilkan dari suatu sistem informasi. Informasi yang berkualitas sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi.

Disamping itu dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, masalah-masalah yang timbul semakin banyak dan kompleks sehingga sulit bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat, apalagi bila informasi yang tersedia tidak berkualitas yaitu informasi yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan tidak memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Sebagai sebuah subsistem organisasi, sistem informasi akuntansi melalui beberapa proses aktivitas manajemen, yaitu berupa mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak internal maupun eksternal organisasi.

Sistem informasi akuntansi berbasis komputer merupakan cara yang tepat dalam mengolah data informasi menjadi lebih efektif, efisien dan terkendali. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer telah menggantikan cara lama dalam mengolah data informasi yang masih tradisional atau manual. Pada sistem manual, mengolah data atau informasi menjadi lebih lama dan mahal karena terkendala pada waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan.

Sistem informasi akuntansi berbasis komputer ditandai dengan berkembangnya teknologi komputer. Pengolahan data yang menjadi lebih cepat, tepat, dan tidak mengenal lelah merupakan dampak dari perkembangan teknologi komputer. Dengan berkembangnya pengolahan data, berkembang pula informasi yang dapat dihasilkan dari akuntansi dan berkembang pula pemakaian-pemakai informasi tersebut (Hartono, 2012).

Lembaga atau instansi pemerintahan merupakan salah satu badan yang juga mengolah dan memproses sistem informasi keuangan baik untuk penerimaan maupun pengeluaran kas yang tidak lepas dari penggunaan sistem informasi akuntansi. Banyak lembaga atau instansi pemerintahan yang memakai sistem informasi akuntansi dalam operasinya namun kualitas sistem informasi akuntansi yang tersedia belum memuaskan, seperti pemakai yang tidak mengerti cara mengoperasikan sistem tersebut sehingga kualitas informasi yang dihasilkan tidak maksimal, sistem informasi yang ada tidak sesuai dengan sistem yang beroperasi, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sistem informasi lebih besar daripada manfaat yang didapat, sistem yang dibuat tidak sesuai dengan ukuran lembaga atau instansi pemerintahan tersebut, seperti lembaga atau instansi pemerintahan yang besar namun menggunakan sistem informasi yang sangat sederhana untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi, begitu juga sebaliknya lembaga atau instansi pemerintahan yang kecil namun menggunakan sistem informasi yang sangat canggih, badan tersebut akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membuat sistem informasi yang canggih dimana sebenarnya dengan sistem informasi yang lebih sederhana juga dapat memenuhi kebutuhan sistem informasinya.

Dalam pengelolaan keuangan lembaga atau instansi pemerintahan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan penting reformasi akuntansi ini adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan.

Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan payung hukum Pemerintah daerah yang antara lain adalah mengenai polapola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah, yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2013), Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan Good Governance. Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Yang terjadi di Indonesia, laporan keuangan negara maupun badan usaha tidak: dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mengetahui dan mengantisipasi keadaan dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan (Anwar Nasution, 2014) bahkan tidak:

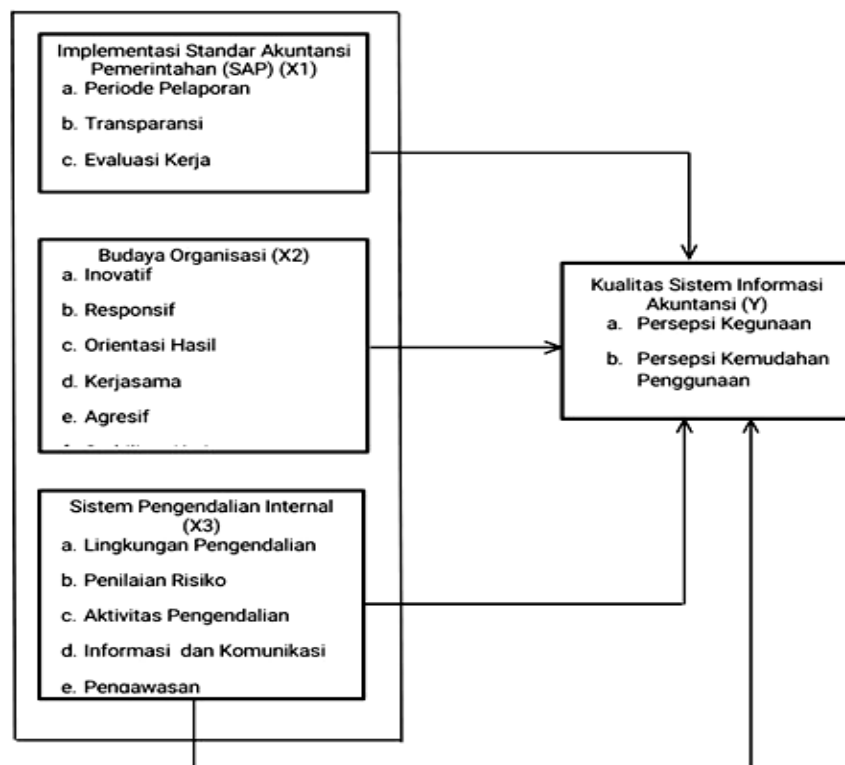
berkualitasnya informasi akuntansi yang dihasilkan membuat laporan keuangan kehilangan nilai kepercayaannya.

Permasalahan yang muncul akibat dari tidak: berkualitasnya informasi akuntansi kerap terjadi di sektor pemerintahan. Didi Widayadi (2012) sebagai Ketua BPKP saat itu, menyatakan: bahwa selama tiga tahun berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini disclaimer. Kondisi tersebut berlanjut sehingga berimplikasi pada kurangnya kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan aset dan kekayaan negara, dan berdampak: buruk pada penerimaan negara dan menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Dewasa ini tuntutan masyarakat: semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. (Wati, 2014).

Menurut Susanto (2013), sistem informasi akuntansi merupakan integrasi dari subsistem baik fisik maupun yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi keuangan menjadi informasi keuangan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul "**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Barat**".

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
3. Variabel sistem pengendalian internal yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 2012). Survey dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk penyelidikan mengenai pengaruh variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan, tingkat budaya organisasi, sistem pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan September 2021 sampai dengan November 2021.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 40 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi total sebanyak 30 orang pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, uji analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f serta koefisien determinasi (R square).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Dari uji validitas yang dilakukan terhadap skor setiap item dengan skor total dari masing-masing atribut dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil seluruh item variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan sahih atau valid, dengan nilai Corrected Item Total Correlation positif di atas angka 0,30.

Tabel 1. Hasil Uji Item Variabel

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	keterangan
Kualitas system informasi akuntansi (Y)	1	0,401	0,30	Valid
	2	0,317	0,30	Valid
	3	0,670	0,30	Valid
	4	0,254	0,30	Valid

Variabel	Item	r _{hitung}	r _{tabel}	keterangan
Variabel Implementasi Standar Akuntansi	5	0,635	0,30	Valid
	1	0,463	0,30	Valid
	2	0,442	0,30	Valid
	3	0,584	0,30	Valid
	4	0,584	0,30	Valid
	5	0,720	0,30	Valid
Variabel Budaya Organisasi (X2)	1	0,723	0,30	Valid
	2	0,679	0,30	Valid
	3	0,744	0,30	Valid
Variabel system pengendalian internal (X3)	1	0,930	0,30	Valid
	2	0,424	0,30	Valid
	3	0,414	0,30	Valid
	4	0,452	0,30	Valid
	5	0,749	0,30	Valid

Sumber: Data Diolah, 2021

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
pemerintahan (X1)	0,601	Reliabel
Budaya organisasi (X2)		
Sistem pengendalian internal (X3)		

Sumber: Data Diolah, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas dapat diterima dengan menggunakan reliabilitas Cronbachs Alpha > 0,50 (Sugiono). Hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan hasil lebih besar dari 50 % (> 60 %), maka pengukuran tersebut dapat diandalkan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil perhitungan regresi

Model	Coefficients ^a				Correlations	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Zero-order
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	7,339	5,382		1,364	,184	
x1	,240	,122	,325	1,964	,060	,522
x2	-,017	,376	-,007	-,047	,963	,232
x3	,507	,174	,472	2,917	,007	,607

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan basil print out SPSS diperoleh koefisien dalam perhitungan regresi di atas, maka persamaan regresinya menjadi :

$$Y = 7,339 + 0,240X_1 + -,017X_2 + 0,507X_3$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Formulasi regresi linear berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 7,339 mempunyai pengertian bahwa jika skor meliputi implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal nilainya tetap/konstan maka peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai nilai sebesar -0,680.
2. Nilai koefisien regresi implementasi standar akuntansi pemerintahan (X 1) sebesar 0,240 berarti ada pengaruh positif implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,240 sehingga apabila skor implementasi standar akuntansi pemerintahan naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,240 poin.
3. Nilai koefisien regresi budaya organisasi (X2) sebesar -,017 berarti tidak ada pengaruhnya budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, sehingga apabila skor budaya organisasi naik 1 poin maka akan diikuti dengan penurunan skor kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebesar -,017 poin.
4. Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal (X3) sebesar 0,507 berarti ada pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,507 sehingga apabila skor sistem pengendalian internal naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,507 poin.

Uji t (Secara Parsial)

Untuk menguji variabel secara parsial atau sendiri-sendiri variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dapat digunakan uji t. Ini dapat dilihat dalam hasil analisa pengolahan data SPSS ver. 15 yang tertuang dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Correlations	
	B	Std. Error	Beta	Sig.	Zero-order	
(Constant)	7,339	5,382		1,364	,184	
x1	,240	,122	,325	1,964	,060	,522
x2	-,017	,376	-,007	-,047	,963	,232
x3	,507	,174	,472	2,917	,007	,607

Sumber : Data Diolah, 2021

Adapun hasil uji t masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan (X1) terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Y)
 - a) Merumuskan hipotesis
 - $H_0 : b_1 = 0$, artinya X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

- Y atau tidak ada pengaruh variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- $H_a : b_1 \neq 0$, artinya X_1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- b) Menghitung nilai t test
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 15 diketahui bahwa nilai t hitung variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan sebesar 10,089 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000.
 - c) Kriteria penerimaan
Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $(n-k-1) = 36$, yang ditentukan t tabel sebesar 0,683.
 - d) Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel
Oleh karena t hitung sebesar 10,089, lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 0,683 yang berarti variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan signifikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pengaruh budaya organisasi (X_2) terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Y)
 - a) Merumuskan hipotesis
 - $H_0 : b_2 = 0$, artinya X_2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
 - $H_a : b_2 \neq 0$, artinya X_2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
 - b) Menghitung nilai t test
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 15 diketahui bahwa nilai t hitung variabel budaya organisasi sebesar 3,638 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000
 - c) Kriteria penerimaan
Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $(n-k-1) = 36$ yang ditentukan t tabel sebesar 0,683.
 - d) Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel
Oleh karena t hitung sebesar 3,638 lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 0,683 yang berarti variabel budaya organisasi signifikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Pengaruh sistem pengendalian internal (X_3) terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Y)
 - a) Merumuskan hipotesis
 - $H_0 : b_3 = 0$, artinya X_3 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap

kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

- $H_a: b_3 \neq 0$, artinya X_3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

b) Menghitung nilai t test

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 15 diketahui bahwa nilai t hitung variabel sistem pengendalian internal sebesar 3,020 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000.

c) Kriteria penerimaan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $(n-k-1) = 36$ yang ditentukan t tabel sebesar 0,683.

d) Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel

Oleh karena t hitung sebesar 3,020 lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 0,683 yang berarti variabel sistem pengendalian internal signifikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPSS ver. 15 maka diketahui bahwa ketiga variabel bebas/independen (X) signifikan berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan ringkasan sebagai berikut :

- Variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan (X_1) dengan nilai t hitung 1,364 > t tabel 0,683
- Variabel budaya organisasi (X_2) dengan nilai t hitung -0,047 > t tabel 0,683
- Variabel sistem pengendalian internal (X_3) dengan nilai t hitung 2,917 > t tabel 0,683

Uji F (Secara Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	84,911	3	28,304	7,223	,001 ^b
Residual	101,889	26	3,919		
Total	186,80	29			

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS ver. 15 yang dituangkan dalam tabel di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

a) Merumuskan Hipotesis

$H_o : b_i = 0$, artinya variabel independen (X) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

$H_a : b_i \neq 0$, variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

b) Menghitung nilai F hitung

Berdasarkan hasil analisa data SPSS diketahui F hitung sebesar 7,223 dengan

signifikan 0,001.

c) Menentukan kriteria penerimaan

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah = 0,05 atau dengan interval keyakinan sebesar 95% dengan $df (n-k-1) = 36$ dan ditentukan nilai $F_{tabel} = 2,86$.

d) Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}

Oleh karena nilai F_{hitung} sebesar 7,223, berarti variabel bebas/independen (X) yang meliputi implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bisa dikatakan signifikan karena dari pengujian menunjukkan bahwa hasil $F_{hitung} = 288,389$ lebih besar dari $F_{tabel} = 2,86$ atau bisa dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji Beta (Variabel Dominan)

Tabel 6. Hasil Uji Beta

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Correlations	
	B	Std. Error	Beta	Sig.	Zero-order	
(Constant)	7,339	5,382		1,364	,184	
x1	,240	,122	,325	1,964	,060	,522
x2	-,017	,376	-,007	-,047	,963	,232
x3	,507	,174	,472	2,917	,007	,607

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel yang meliputi implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal maka yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah variabel sistem pengendalian internal (X3), dengan nilai standar Beta paling tinggi sebesar 0,472.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^a							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1		,455	,392	1,980	,455	7,223	3

Sumber: Data Diolah, 2021

Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,392 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi implementasi standar akuntansi

pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal mempunyai kontribusi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebesar 39,2%, sedangkan sisanya sebesar 60,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Oleh karena t_{hitung} sebesar 1,364. lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 0,683 yang berarti variable implementasi standar akuntansi pemerintahan signifikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah pusat/daerah dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Tujuan penerapan standar akuntansi menurut Belkaoui (1985) adalah menghasilkan informasi keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat dibandingkan. Untuk keperluan tersebut Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 ayat 2015 sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan bagi pemerintah.

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 4 dalam PP No. 24 tahun 2015 menyatakan bahwa: Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah" Penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan daerah melalui penyajian informasi keuangan yang berkualitas. standar akuntansi pemerintahan juga memiliki kekuatan hukum sehingga konsekuensinya setiap pemerintahan daerah wajib membuat laporan keuangan. Dalam UU No. 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 184 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa: "laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah".

Kemudian dalam pasal 56 UU No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara menyebutkan bahwa: "laporan keuangan yang harus dibuat di setiap unit kerja adalah laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan yang menyusun laporan arus kas adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah."

Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Bastian (2015) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.

Dalam struktur lembaga atau instansi pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi• transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumedokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Oleh karena thitung sebesar -0,047 lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 0,683 yang berarti variabel budaya organisasi tidak signifikan berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Menurut Wilkins dan Ouchi mendefinisikan budaya organisasi yaitu: "Budaya sebagai sesuatu yang dianggap biasa dan dapat dibagi bersama yang diberikan orang terhadap lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial dalam pengertian ini mungkin berupa negara, kelompok etnis tertentu, desa di daerah, atau sebuah organisasi.(Indrawijaya, 2010).

Menurut Cushway dan Lodge (2010), menyatakan bahwa Budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para karyawan berperilaku.

Budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu diajarkan/diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan, dan merasakan, terkait dengan masalahmasalah tersebut (Tika, 2010).

Soedjono (2015) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sistem informasi yang meliputi penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya, budaya organisasi juga dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat.

Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi dengan pemuktahiran setiap komponen sistem informasi pada pokoknya merupakan upaya peningkatan integrasi setiap komponen sistem informasi akuntansi pada organisasi. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya organisasi dalam penelitian ini adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Oleh karena thitung sebesar 2,917 lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 0,683 yang berarti variabel sistem pengendalian internal signifikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Xu, et al. (2014) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik.

Pengendalian internal yang didefinisikan oleh COSO adalah: "*Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

1. *Effectiveness and efficiency of operations*

2. *Reliability of financial reporting*3. *Compliance with applicable laws and regulations."*

Tujuan yang pertama adalah menekankan pada tujuan dasar dalam setiap organisasi, mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber daya. Kedua adalah menyangkut laporan organisasi. Terakhir adalah berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dimana organisasi itu berada.

Sistem pengendalian intern bukan hal baru dalam pemerintahan. Petrovits et al. (2011) menyatakan:

"Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations."

PP Nomor 60 Tahun 2013 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Sistem Pengendalian Internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi.

Oleh karena nilai Fhitung sebesar 7,223 berarti variabel bebas/independen (X) yang meliputi implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bisa dikatakan signifikan karena dari pengujian menunjukkan bahwa hasil Fhitung = 7,223 lebih besar dari F tabel = 2,86 atau bisa dikatakan H0 ditolak dan Ha diterima.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2011) *"an accounting information system is a collection of resources, such as people and equipment, design to transform financial and other data into information to a variety of decision makers according to their needs and entitlement"*.

Menurut Hall (2011) *"Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang terdiri dari tiga subsistem, yaitu transaction processing system, general ledger/financial reporting system, management reporting system"*.

Defenisi-defenisi tersebut menjelaskan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi adalah tingkat baik buruknya sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh suatu organisasi, sistem informasi akuntansi yaitu kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Kualitas sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini diukur dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan indikatornya yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). *Technical Acceptance Model* (TAM) adalah sebuah teori yang menilai kualitas sistem informasi akuntansi berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap

terbaik terhadap sistem dan kemudian dapat menerima serta menerapkan sistem tersebut. Dalam TAM terdapat dua indikator, yaitu: Persepsi kegunaan (*Perceived usefulness*) dan Persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived ease of use*) Davis mengartikan *Perceived usefulness* sebagai tindakan dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Sedangkan *Perceived ease of use* diartikan sebagai tingkatan seseorang mempercayai bahwa menggunakan teknologi hanya memerlukan sedikit usaha.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,937 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal mempunyai kontribusi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebesar 93,7%, sedangkan sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dari hasil uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan. Hasil analisa menunjukkan bahwa variabel bebas/independen (X) faktor implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal secara simultan signifikan berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
3. Dari penelitian juga diperoleh jawaban bahwa diantara implementasi standar akuntansi pemerintahan, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal, maka sistem pengendalian internal (X3) merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ibrahim., Indra, Wijaya. (2010). Perilaku Organisasi. Jakarta. Sinar Baru Algesindo.
- Al-Hiyari, Ahmad. (2013). Factors that Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia, International Journal: University Utara Malaysia, Malaysia.
- Anwar, Nasution. (2014). Sistem Perbendaharaan Negara. Jakarta. Okezone.
- Ari, Udiyanti., Ni, Luh, Nyoman. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng) Jurnal Penelitian: Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Bali.

Azhar, Susanto. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Lingga Jaya. Bandung Azwar, S. (1997). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga. Barry, Cushway and Derek, Lodge. 2013. Organisational Behaviour and Design. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

Belkaoui, A. Riadhi. (2011). Accounting Theory. Edisi 5. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

Bodnar., and William, S. Hopwood. (2011). Accounting Information Systems, Eighth Edition Prentice Hall

Crosby, P. (1979). Quality is Free: The Art of Making Quality Certain. New York. Carolina, Yenni. 2014. Organizational Factors and Accounting Information System Quality (Empiric Evidence from Manufacturing Firms in Bandung Indonesia). Research Journal of Finance and Accounting. Vol.5 No.5.

Carolina, Yenni., dan Rapina. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi dan Struktur Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Serta Implikasinya pada Kualitas Informasi Akuntansi. Laporan Penelitian: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Erlina. (2011). Metodologi Penelitian: Untuk Akuntansi. USU PRESS. Medan.

Fikri, M. Ali. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). Jurnal Penelitian: Universitas Mataram, NTB.

Finnegan, David., dan Willcocks, Leslie. (2012). Implementing CRM From Technology to Knowledge. Wiley Series in Informatin Systems.

Firman, A., & Said, S. (2016). Linking organizational strategy to information technology strategy and value creation: impact on organizational performance.

Haeranah, H., Firman, A., & Oktaviani, A. R. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Teknologi Terhadap Peningkatan Kinerja. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(1), 57-70.